

**KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SELATAN  
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM *ELECTRONIC* KTP (e-KTP) DI  
KECAMATAN PADANG SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

**OLEH:**

**ROBI EKA PUTRA  
0810842020**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2012**

## ABSTRAK

**Robi Eka Putra, No. BP : 0810842020, Kinerja Pemerintah Kecamatan Padang Selatan dalam Pelaksanaan Program *Electronic* KTP (e-KTP) di Kecamatan Padang Selatan. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2012. Dibimbing oleh : Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA dan Rozidateno Putri Hanida, S. IP, M.PA. Skripsi ini terdiri dari 178 halaman dengan referensi 17 buku teori, 11 buku metode, 1 skripsi, 2 jurnal penelitian, 1 Peraturan Walikota, 2 dokumen, dan 4 website internet.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja Pemerintah Kecamatan Padang Selatan dalam pelaksanaan program e-KTP di Kecamatan Padang Selatan. Sebagai salah satu Kecamatan yang telah menjadi percontohan nasional dalam proyek percontohan e-KTP pada Tahun 2009, diharapkan Kecamatan Padang Selatan dapat menunjukkan kinerja yang maksimal dalam program e-KTP Nasional yang menyusul setelah proyek percontohan tadi. Namun, dalam pelaksanaan proyek percontohan, Kecamatan Padang Selatan menunjukkan kinerja yang belum maksimal terlihat dari tidak tercapainya target yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Permasalahan ini diharapkan tidak terulang kembali pada pelaksanaan program e-KTP Nasional.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian untuk melihat kinerja tersebut dari hasil penelitian, maka dilakukan teknik triangulasi. Penelitian ini menggunakan konsep yang peneliti turunkan dari teori Hersey, Blanchard dan Johnson yaitu teori satelit kinerja organisasi. Berdasarkan teori yang peneliti gunakan ini, kinerja organisasi diperoleh dari integrasi kelima faktor yang terdiri dari : pengetahuan, sumber daya bukan manusia, posisi strategis, proses kemanusiaan, dan struktur. Apabila kelima faktor tersebut berada dalam kondisi yang baik, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi yang bersangkutan akan maksimal, dan sebaliknya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kecamatan Padang Selatan dalam pelaksanaan program e-KTP masih belum maksimal karena masih bermasalah pada faktor sumber daya bukan manusia yaitu pada indikator peralatan dan pada proses kemanusiaan khususnya pada indikator nilai, norma, dan sikap petugas. Selain itu juga bermasalah pada faktor struktur terutama pada indikator sistem informasi yang mengakibatkan target akhir Kecamatan Padang Selatan dalam perekaman data penduduk yang masih tertinggal dari kecamatan lainnya yang ada di Kota Padang.

**Kata Kunci : Kinerja, Pemerintah, dan Program**

## ABSTRACT

**Robi Eka Putra, Registered Student Number : 0810842020, The Performance of Padang Selatan District Government in Implementing Electronic ID Card (e-KTP) Program in Padang Selatan District. Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, 2012. Supervised by : Roni Ekha Putera, S.IP, M. PA and Rozidateno Putri Hanida, S. IP, M. PA. This thesis consists of 178 pages with references to the theory of 17 books, 11 books method, a thesis, 2 journals, 1 Major Regulation, 2 documents and 4 internet website.**

The objective of this research is to describe the performance of Padang Selatan District in implementing electronic ID card (e-KTP) program in the Padang Selatan District. As a one of district which has been national sample in pilot project of e-KTP program in the year 2009, Padang Selatan District is expected to show maximum performance in the National e-KTP program that followed after the pilot project earlier. In the fact, the implementation of the pilot project, the Padang Selatan District has not yet been able to present a maximum performance seen of not achieving the targeted number as planned by the Central Government. The problem is therefore expected not to be repeated in the implementation of National e-KTP program.

The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques used in this research were interviews, observation and documentation. Then to see the performance of research results, then conducted data triangulation technique. This research use a research concept elaborated from the organizational performance satellite theory by Hersey, Blanchard and Johnson. According to this theory, the organizational performance will be achieved if five integrated factors are fulfilled, namely: knowledge, human resources, strategic positioning, human process, and structure. When the five factors are in good condition, it can be concluded that the organizational performance will be maximum, and reversely.

The result of this research indicated that the performance of Padang Selatan District Government in implementing the e-KTP program is not yet maximum because still have problem at non-human resource factor that is at equipments indicator and human process particularly at value indicator, norm, and officer attitude. Besides, that also have problem at structure factor particularly at information system indicator, also plays a role in the failure which then leads Padang Selatan District to an inability in achieving final target of recording people's data, and the district is left behind compared to other districts in Padang City.

**Keywords : Performance, Government, and Program**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil‘alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Kinerja Pemerintah Kecamatan Padang Selatan dalam Pelaksanaan Program *Electronic* KTP (e-KTP) di Kecamatan Padang Selatan**” dengan baik, serta shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia kepada kehidupan yang beradab dan berilmu pengetahuan.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah bersedia memberikan waktu dan perhatiannya. Oleh karena itu, ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis berikan kepada:

1. Kedua orangtua penulis, Ayahanda Darnius dan Ibunda Reni Marita yang telah mendidik, membesarkan dan banyak berkorban untuk penulis serta Kakanda Ria Andriani yang selalu menjadi sosok kakak yang terbaik dan satu-satunya untukku.
2. Bapak Drs. Yoserizal, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Desna Aromatica, S.AP, M.AP selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
3. Bapak Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA selaku pembimbing I dan Ibu Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA selaku pembimbing II yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik berupa tenaga maupun pikiran serta arahan yang sangat berguna demi kemajuan penulis dan telah meluangkan waktu untuk penulis di sela-sela kesibukan selama ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan penulis selama proses bimbingan.
4. Ibu Kusdarini, S.IP, M.PA, Bapak Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc.Sc, Bapak Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP, M.PA, dan Ibu Desna Aromatica, S.AP, M.AP, selaku tim penguji skripsi penulis yang telah memberikan masukan, kritik serta saran demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.

5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara, serta staf pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama duduk di bangku kuliah.
6. Bapak dan Ibu staf subbagian akademik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas yang telah melayani keperluan penulis dalam mengurus surat-menyurat terkait penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Camat Padang Selatan beserta seluruh aparaturnya, Bapak Lurah Air Manis, Ibu Lurah Mata Air, Bapak Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, terutama kepada informan yang telah banyak membantu penulis di lapangan.
8. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas khususnya kepada angkatan '08, senior penulis '05 , '06 , '07 serta junior penulis , '09, '10, '11 , jangan pernah berhenti wujudkan impian.
9. Semua pihak yang telah dengan tulus membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Segala keterbatasan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik, saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini akan sangat berguna bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang dan tidak lupa penulis mendoakan semoga bantuan dan bimbingan dari semua pihak menjadi pahala yang dilipatgandakan oleh Allah SWT . Amin.

Padang, Juni 2012

Penulis

Robi Eka Putra

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR DAN SKEMA</b> .....	x
<b>LAMPIRAN</b> .....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Manfaat Penelitian .....	14
1.5 Sistematika Pembahasan .....	15

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Studi Penelitian yang Relevan .....	16
2.2 Teori.....	19
2.2.1 Kinerja .....	19
2.2.2 Kinerja Organisasi .....	22
2.2.3 Pengukuran Kinerja.....	24
2.2.4 <i>Electronic</i> KTP (e-KTP) .....	48
2.3 Skema Pemikiran .....	52
2.4 Definisi Konsep .....	53

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Pendekatan dan Desain Penelitian .....	54
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	54
3.2.1 Wawancara .....	55
3.2.2 Dokumentasi .....	56
3.2.2 Observasi .....	57
3.3 Teknik Pemilihan Informan .....	58
3.4 Peranan Peneliti .....	60
3.5 Proses Penelitian .....	61
3.6 Unit Analisis .....	62
3.7 Teknik Analisis Data.....	63
3.8 Triangulasi Data.....	65

#### **BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

4.1 Visi dan Misi Kecamatan Padang Selatan .....	72
4.2 Tujuan Kecamatan Padang Selatan.....	73
4.3 Sasaran Kecamatan Padang Selatan.....	74
4.4 Struktur Pemerintahan Kecamatan Padang Selatan .....	76
4.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Padang Selatan.....	77
4.6 Program dan Kegiatan Kecamatan Padang Selatan .....	87

#### **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

5.1 Kinerja Pemerintah Kecamatan Padang Selatan dalam Pelaksanaan Program e-KTP Berdasarkan Faktor Pengetahuan.....	91
5.1.1 Pengetahuan Petugas mengenai Pelaksanaan Teknis dan Administratif Program e- KTP.....	94
5.1.2 Pengetahuan Petugas tentang Pelayanan kepada Masyarakat dan Penyelesaian Masalah Administratif, Sistem.....	108
5.2 Kinerja Pemerintah Kecamatan Padang Selatan dalam Pelaksanaan Program e-KTP Berdasarkan Faktor Sumber Daya Bukan Manusia.....	114
5.2.1 Optimalisasi Kuantitas Peralatan dalam Pelaksanaan	

Program e-KTP.....	115
5.2.2 Kelayakan Lingkungan Kerja dan Gedung dalam Pemberian Pelayanan kepada Masyarakat.....	121
5.2.3 Pemanfaatan Teknologi Secara Optimal.....	123
5.2.4 Tersedianya Modal dan Dana yang Memadai.....	127
5.3 Kinerja Pemerintah Kecamatan Padang Selatan dalam Pelaksanaan Program e-KTP berdasarkan Faktor Posisi Strategis .....	131
5.3.1 Sumber Daya Manusia yang Memadai secara Kualitas Dan Kuantitas dalam Pelaksanaan Program e-KTP.....	133
5.3.2 Cara yang Ditempuh Pemerintah Kecamatan Padang Selatan dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan.....	143
5.4 Kinerja Pemerintah Kecamatan Padang Selatan dalam Pelaksanaan Program e-KTP berdasarkan Faktor Proses Kemanusiaan.....	147
5.4.1 Sikap Petugas yang Menjadi Referensi Penilaian bagi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program e-KTP.....	148
5.4.2 Nilai dan Norma yang Menjadi Pegangan Petugas dan Menjadi Referensi Penilaian Masyarakat .....	152
5.4.3 Interaksi yang Optimal Petugas dengan Petugas dan Petugas dengan Masyarakat.....	156
5.5 Kinerja Pemerintah Kecamatan Padang Selatan dalam Pelaksanaan Program e-KTP berdasarkan Faktor Struktur.....	160
5.5.1 Pengaruh Penambahan Struktur Baru dan Kriteria Penempatan Personil pada Struktur yang Baru dalam Program e-KTP.....	160
5.5.2 Pemanfaatan Sistem Informasi yang Optimal oleh Pemerintah Kecamatan Padang Selatan.....	162
5.5.3 Sistem Manajemen yang Optimal dan Fleksibilitas dalam Pelaksanaan Program e-KTP .....	168



**BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1 Kesimpulan .....	176
6.2 Saran .....	177

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Wajib KTP yang Diundang dan yang Telah Membuat e-KTP di Kantor Camat Padang Selatan per Tanggal 14 November 2011 .....	10
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu dan Sekarang.....	18
Tabel 2.2	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Kecamatan Padang Selatan .....	47
Tabel 2.3	Perbedaan KTP Nasional dan e-KTP .....	49
Tabel 3.1	Daftar Informan .....	59
Tabel 3.2	Rangkaian Proses Penelitian .....	61
Tabel 3.3	Kriteria Penilaian Faktor-Faktor Penentu Kinerja .....	65
Tabel 3.4	Jumlah Wajib KTP di Kecamatan Padang Selatan .....	68
Tabel 3.5	Daftar Informan dalam Triangulasi.....	69
Tabel 4.1	Luas Kelurahan di Kecamatan Padang Selatan.....	71
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk dan Wajib KTP di Kecamatan Padang Selatan Berdasarkan Kelurahan .....	72
Tabel 4.3	Sasaran dan Indikator Sasaran Kecamatan Padang Selatan.....	75
Tabel 5.1	Daftar Pembagian Kelurahan untuk Perekaman Data e-KTP .....	118
Tabel 5.2	Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Padang Selatan.....	129
Tabel 5.3	Jumlah Pegawai Kantor Camat Padang Selatan .....	134
Tabel 5.4	Daftar Pegawai Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Padang Selatan.....	137
Tabel 5.5	Daftar Nama-nama Operator di Kecamatan Padang Selatan .....	141

## DAFTAR GAMBAR DAN SKEMA

Skema 2.1 Model Satelit Kinerja Organisasi .....	25
Gambar 4.1 Peta Kecamatan Padang Selatan .....	70
Skema 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Padang Selatan .....	76
Skema 5.1 Teknis Pelaksanaan Perekaman Data e-KTP .....	100
Skema 5.2 Alur Pelayanan e-KTP .....	109
Gambar 5.1 Keadaan Lingkungan Kerja dan Gedung Kantor Kecamatan Padang Selatan.....	122
Gambar 5.2 Contoh Tampilan <i>Benroller-Diagnosis Tool</i> .....	124
Gambar 5.3 Perekaman Mobile e-KTP di Rumah Penduduk dan Kantor Lurah.....	170

## LAMPIRAN

- Lampiran 1 Lembar Bukti Wawancara
- Lampiran 2 Surat Keputusan dan Surat Penelitian
- Lampiran 3 Daftar Rekapitulasi Perekaman Wajib KTP Sementara Kecamatan Padang Selatan
- Lampiran 4 Daftar Personil Kecamatan Padang Selatan dan Operator Perekaman dan Verifikasi
- Lampiran 5 Peraturan Walikota Padang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan
- Lampiran 6 Standar Operasional Prosedur (SOP) E-KTP Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 2011

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagai akibat perkembangan teknologi informasi, maka Indonesia sebagai negara yang berdaulat harus mengikuti perkembangan tersebut dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada tatanan pemerintahannya. Mulai dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah di Indonesia telah terkena dampak dari perkembangan teknologi dan informasi tersebut.

Salah satu program pemerintah yang semakin memperlihatkan bahwa Indonesia telah melakukan pembaharuan dalam sistem pemerintahannya dalam rangka perkembangan teknologi dan informasi adalah penerapan *electronic-Government (e-Government)* yang mulai dan telah diterapkan di Indonesia diawali dengan adanya Instruksi Presiden No.3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Mulai dari pemerintah daerah sampai kepada pemerintah pusat telah terintegrasi dengan sistem *e-Government*, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada pelaksanaan tugas pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat beserta pemangku kepentingan yang ada. Sehingga akan menciptakan kinerja instansi pemerintahan yang baik terutama dalam hal pelayanan publik.

Pelaksanaan pelayanan publik yang optimal tentu akan memberikan dampak positif kepada kinerja instansi yang berkaitan. Dengan kata lain semakin baik pelaksanaan pelayanan publik oleh instansi pemerintah, maka akan semakin baik juga kinerja instansi yang bersangkutan. Maka dari itu, permasalahan kinerja merupakan sesuatu hal yang penting untuk dibicarakan pada saat ini. Instansi pemerintah dimulai dari pusat sampai kepada daerah dituntut untuk menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas masing-masing instansinya.

Kinerja pemerintah juga merupakan wujud dari akuntabilitas pemerintah kepada publik, dimana pemerintah harus bertanggung jawab dalam melaksanakan program yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya target yang harus diselesaikan oleh pemerintah dalam pelaksanaan program dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan target tersebut harus diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan kata lain pemerintah harus melaksanakan program yang telah menjadi tugas mereka secara optimal agar dapat menghasilkan kinerja yang baik pula. Sehingga keberhasilan dalam penyelesaian suatu program dengan optimal akan memberikan indikasi bahwa instansi yang bersangkutan menunjukkan kinerja yang baik. Dan kinerja yang baik merupakan tujuan yang harus dicapai oleh semua instansi pemerintahan. Sedangkan kinerja itu sendiri adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.<sup>1</sup> Sehingga target dalam pelaksanaan program merupakan salah satu indikator yang harus dicapai secara optimal oleh instansi terkait agar dapat mewujudkan kinerja yang optimal pula pada program tersebut.

Salah satu program pemerintah yang tengah mendapat perhatian yang sangat besar pada saat ini adalah pelaksanaan program *Electronic* KTP(e-KTP). E-KTP adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada data induk kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK ini nantinya merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan

---

<sup>1</sup> Veithzal Rivai dan Ahmad Fawzi Mohd. Basri.2005. "*Performance Appraisal (Sistem yang Tepat untuk menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan)*". Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal.14

berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).<sup>2</sup> E-KTP dirasa sangat perlu untuk dapat menciptakan sistem administrasi kependudukan yang rapi dan teratur dalam rangka mempermudah pemberian pelayanan publik oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat. Pemanfaatan e-KTP diharapkan dapat berjalan lancar karena memiliki fungsi dan kegunaan yang sangat membantu pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan dalam hal pemberian dan pemanfaatan pelayanan publik.

Program e-KTP di Indonesia diawali dengan pelaksanaan proyek percontohan yang dimulai semenjak Tahun 2009 dengan ditunjuknya empat kota sebagai *pilot project* percontohan e-KTP nasional. Adapun kota tersebut adalah Padang, Makassar, Yogyakarta, dan Denpasar. Ditunjuknya empat kota ini sesuai dengan Surat Dirjen Adminduk Depdagri no. 471. 13/ 3350/MD tentang pelaksanaan e-KTP berbasis NIK Nasional di empat kota percontohan tersebut. Kota Padang adalah salah satu kota dari empat kota percontohan e-KTP nasional. Dalam hal ini Kecamatan Padang Selatan adalah kecamatan yang ditunjuk mewakili Kota Padang dalam proyek percontohan ini.

Dipilihnya Kecamatan Padang Selatan dalam pelaksanaan proyek percontohan ini adalah disebabkan karena Kecamatan Padang Selatan memiliki data kependudukan yang valid dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Kota Padang. Selain itu Kecamatan Padang Selatan juga dianggap memiliki fasilitas gedung dan halaman kantor serta personil yang lebih memadai. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Kepala Bidang Informasi Dinas

---

<sup>2</sup> [www.e-ktp.com](http://www.e-ktp.com) . *Apa dan Mengapa E-KTP*. <http://www.e-ktp.com/2011/06/hello-world/>. diakses tanggal 12 September 2011, pukul 19.05 WIB

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang pada saat observasi awal yang menyatakan bahwa :<sup>3</sup>

”Kecamatan Padang Selatan dipilih dalam proyek percontohan E-KTP karena memiliki data kependudukan yang valid serta didukung oleh fasilitas gedung dan personil yang memadai untuk peroyek percontohan ini.”

Kecamatan Padang Selatan yang telah ditunjuk untuk mewakili Kota Padang dalam proyek percontohan e-KTP secara nasional tentu harus melaksanakan proyek tersebut secara maksimal agar target yang telah ditentukan oleh pusat dapat diselesaikan pada proyek percontohan tersebut. Dan akan menjadi rekomendasi bagi Kecamatan Padang Selatan sendiri dan daerah lainnya dalam pelaksanaan program e-KTP yang menyusul setelah dilaksanakan proyek percontohan. Sehingga Kecamatan Padang Selatan akan menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan program e-KTP tersebut.

Pelaksanaan proyek percontohan e-KTP di Kecamatan Padang Selatan telah dimulai pada awal Tahun 2009 namun proyek tersebut terhenti sementara dikarenakan gempa yang terjadi di Sumatra Barat pada September 2009. Kemudian proyek percontohan tersebut dilanjutkan kembali pada tahun 2010. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi Pemerintah Kecamatan Padang Selatan dalam melaksanakan proyek percontohan tersebut dengan optimal.

Proyek percontohan e-KTP mewajibkan 26.000 warga dikota percontohan untuk memiliki e-KTP. Namun berdasarkan observasi awal ditemukan bahwa masih ada wajib KTP yang bahkan belum berhasil direkam di Kecamatan Padang Selatan. Dimana dari 26.000 wajib KTP, masih tersisa 1.300 atau 5 % wajib KTP yang belum direkam. Namun target dari pelaksanaan proyek percontohan e-KTP adalah 26.000 warga telah memiliki e-KTP. Hal ini tentu berbeda dengan pelaksanaan e-KTP nasional yang menargetkan seluruh wajib KTP telah terekam data kependudukannya. Apabila mengacu pada target pelaksanaan proyek

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Rahima Taib, selaku Kabid Informasi Dindikcapil Kota Padang, Rabu 16 November 2011, pukul 14.00, di Kantor Dindikcapil Kota Padang.



percontohan e-KTP maka dari 26.000 wajib KTP yang ditargetkan baru 7.401 atau 28,5% wajib KTP yang memiliki e-KTP. Dengan kata lain, masih tersisa 71,5 % target yang tidak tercapai.

4

Selain target yang tidak tercapai, permasalahan lain juga ditemukan pada pelaksanaan proyek percontohan tersebut diantaranya masalah minimnya koordinasi dengan SKPD lain, tidak tersedianya *Standard Operating Procedure* (SOP) atau petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), kurangnya petugas e-KTP di kecamatan dan di kelurahan, minimnya peralatan, kurangnya kesadaran masyarakat, panjangnya struktur birokrasi pelaksana program e-KTP dan tidak jelasnya pembagian wewenang antarSKPD dalam mengimplementasikan program e-KTP.<sup>5</sup> Permasalahan ini tentu akan berpengaruh pada pelaksanaan program e-KTP nasional apabila tidak diatasi secepatnya.

Belum tercapainya target yang ditentukan sebelumnya dalam pelaksanaan proyek percontohan e-KTP ini mungkin dapat dijadikan salah satu wujud dari kurang optimalnya aparatur Kecamatan Padang Selatan dalam mencapai hasil/target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini tentu sangat terkait dengan kinerja aparatur Kecamatan Padang Selatan dalam proyek percontohan ini. Dengan melihat *output* yang dihasilkan oleh pemerintah Kecamatan Padang Selatan yang dalam hal ini adalah jumlah masyarakat yang telah memiliki e-KTP maka dapat disimpulkan kinerja Pemerintah Kecamatan Padang Selatan masih belum baik dikarenakan masih banyak masyarakat Padang Selatan yang belum memiliki e-KTP apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pemerintah pusat dalam proyek percontohan tersebut. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa petugas yang ada di Kecamatan Padang Selatan pada pelaksanaan proyek percontohan belum menjalankan tugas dan fungsi mereka secara optimal. Sehingga hal ini juga akan berpengaruh pada pelaksanaan program e-

---

<sup>4</sup> Roni Ekha Putera, Tengku Rika Valentina dan Robi Eka Putra. 2011. "*Implementasi Program KTP Elektronik (E-KTP) dalam mewujudkan Pelayanan Prima*". Laporan Penelitian Dosen Muda DIPA Unand. Lembaga Penelitian Universitas Andalas. Hal.25.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hal.39.

KTP Nasional yang akan dilaksanakan setelah proyek percontohan. Dan berakibat pada pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Padang Selatan pada pelaksanaan program e-KTP Nasional.

Pelaksanaan program e-KTP Nasional khususnya di Kecamatan Padang Selatan telah dimulai pada pertengahan Tahun 2011. Tentu diharapkan pelaksanaan program nasional ini akan menunjukkan hasil yang optimal dikarenakan Kecamatan Padang Selatan telah melakukan proyek percontohan sebelum program ini dilaksanakan.

Namun berdasarkan observasi awal, pelaksanaan program e-KTP yang sedang dilaksanakan juga mengalami permasalahan antara lain dalam pengembalian formulir yang telah dibagikan pihak kelurahan kepada warganya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara pada saat observasi awal dengan Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Padang Selatan yang menyatakan bahwa :<sup>6</sup>

“Permasalahan yang dihadapi adalah masyarakat yang ada di kelurahan tidak mengembalikan formulir/blanko yang telah disebarkan oleh pihak kelurahan sehingga banyak masyarakat yang tidak terdaftar kependudukannya. Apalagi banyak masyarakat yang baru berumur tujuh belas tahun yang belum juga didaftarkan oleh keluarganya. Kebanyakan dari mereka beralasan tidak mendapatkan informasi mengenai pengurusan e-ktp.”

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan tadi, jelas bahwa Pemerintah Kecamatan Padang Selatan mengalami permasalahan dalam hal sosialisasi dan koordinasi pada masyarakat yang ada di setiap kelurahan, terutama di dalam hal pengembalian formulir isian untuk masyarakat dalam pendataan wajib KTP. Dimana banyak dari masyarakat yang belum mengembalikan formulir tersebut. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang belum terdaftar kependudukannya. Namun pihak kecamatan belum melakukan tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu masyarakat juga masih kebingungan dalam

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Novian, selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Padang Selatan, Jumat 30 September 2011, Pukul 10.00WIB, di kantor Camat Padang Selatan.

mendaftarkan anggota keluarga mereka yang baru memasuki usia tujuh belas tahun. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang kebingungan dan menanyakan permasalahan tersebut kepada pihak kecamatan. Padahal masalah tersebut dapat diatasi apabila pemerintah Kecamatan Padang Selatan telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan baik kepada masyarakat dan kelurahan yang ada di Kecamatan Padang Selatan.

Dari fenomena di atas jelas bahwa masyarakat mengalami permasalahan untuk mendapatkan informasi yang akurat dalam pengurusan e-KTP. Hal ini terlihat dari pengakuan warga yang beralasan tidak mendapatkan informasi mengenai pengurusan e-KTP sebagaimana kutipan wawancara sebelumnya. Tentu hal ini akan berdampak pada capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Padang Selatan dalam pelaksanaan program e-KTP. Padahal apabila merujuk pada teori Hersey, Blanchard, dan Johnson yang menyatakan bahwa kinerja organisasi ditentukan oleh integrasi dari lima faktor, yaitu pengetahuan, sumber daya bukan manusia, posisi strategis, proses kemanusiaan dan struktur, maka fenomena di atas membuktikan bahwa terdapat permasalahan dalam struktur organisasi Pemerintah Kecamatan Padang Selatan itu sendiri. Pemerintah Kecamatan Padang Selatan merupakan suatu organisasi yang memiliki struktur pemerintahan dengan fungsi dan kewajiban masing-masing.

Namun dalam pelaksanaan program e-KTP yang sedang dilaksanakan, ditemukan indikasi bahwa struktur yang ada pada Pemerintah Kecamatan Padang Selatan mengalami permasalahan dalam pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi, hal ini terlihat dari kurangnya informasi mengenai pengurusan e-KTP untuk masyarakat yang menyebabkan masih banyak masyarakat yang ragu dalam pengurusan e-KTP tersebut. Permasalahan ini tentu juga terkait dengan sumber daya manusia yang ada pada struktur organisasi di Kecamatan Padang Selatan, terutama yang bertugas untuk melaksanakan fungsi sosialisasi dan koordinasi tadi.

Permasalahan sumber daya manusia tentu menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan program e-KTP ini. Permasalahan yang terjadi khususnya pada sosialisasi dan

koordinasi tadi, kemungkinan besar disebabkan oleh sumber daya manusia yang ada pada Pemerintah Kecamatan Padang Selatan yang bertugas untuk melaksanakan tugas tersebut belum melaksanakan tugas mereka secara optimal. Permasalahan pada sumber daya manusia ini mungkin disebabkan sumber daya manusia tersebut tidak paham akan tugas mereka atau penempatan tugas yang tidak sesuai dengan kualifikasi mereka atau alasan lain yang perlu ditelusuri lebih jauh. Hal ini juga menimbulkan asumsi bahwa pengetahuan petugas dalam melaksanakan program ini masih bermasalah.

Pengetahuan tentang pelaksanaan teknis dan administratif tentu harus sudah dimiliki oleh personil yang bertugas dalam pelaksanaan program e-KTP ini. Dimana pelaksanaan teknis berkaitan dengan pelaksanaan secara teknis program e-KTP mulai dari awal pelaksanaan sampai kepada akhir program. Dan pelaksanaan administratif berkaitan dengan hal yang bersifat administrasi pada program e-KTP. Pelaksanaan sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat tentu termasuk kedalam pelaksanaan teknis program e-KTP, tetapi masih ditemukan permasalahan pada bidang ini. Hal ini tentu juga berkaitan dengan pengetahuan personil mengenai pelaksanaan teknis program e-KTP tersebut.

Permasalahan yang dijelaskan berdampak kepada pencapaian wajib KTP yang berhasil direkam oleh pihak kecamatan. Dimana terhitung Tanggal 14 November 2011, baru 5 dari 12 kelurahan yang telah melakukan perekaman data e-KTP di Kantor Camat Padang Selatan. Dari jumlah wajib KTP yang diundang pihak kecamatan, wajib KTP yang telah melakukan pembuatan e-KTP dibandingkan dengan wajib KTP yang diundang pihak kecamatan belum mencapai 55%. Hal ini sesuai dengan tabel 1.1.

Tabel 1.1  
Perbandingan wajib KTP yang diundang dan yang telah membuat e-KTP di Kantor Camat Padang Selatan per tanggal 14 November 2011

No.	Kelurahan	Diundang	Direkam	Persentase (%)
1.	Ranah Parak Rumbio	2823	1124	39,815 %
2.	Mata Air	9140	5109	55,897 %

3.	Rawang	8624	4738	54,939 %
4.	Pasa Gadang	5203	2731	52,488 %
5.	Seberang Padang	5350	3164	59,140 %
	Jumlah	31140	16866	54,161 %

Sumber : Diolah peneliti dari laporan pelaksanaan e-KTP Kecamatan Padang Selatan Tahun 2011.

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa dari 5 kelurahan yang telah melakukan pembuatan e-KTP di Kantor Camat Padang Selatan berdasarkan jadwal yang ditentukan Pemerintah Kecamatan Padang Selatan, jumlah masyarakat wajib KTP yang hadir dibandingkan dengan wajib KTP yang diundang pihak kecamatan belum mencapai 55 %. Hal ini menimbulkan pertanyaan kembali mengenai fungsi Pemerintah Kecamatan Padang Selatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat setempat, sehingga mengakibatkan masih belum tercapainya target yang ditentukan pemerintah pusat baik dalam proyek percontohan sampai kepada pelaksanaan e-KTP pada saat ini.

Berdasarkan pelaksanaan *pilot project* e-KTP yang telah dilaksanakan di Kecamatan Padang Selatan, maka Pemerintah Kecamatan Padang Selatan terbukti belum berhasil mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Disamping itu permasalahan sosialisasi, koordinasi dan informasi kepada masyarakat juga menjadi permasalahan pada pelaksanaan program e-KTP di Kecamatan Padang Selatan. Hal ini berakibat pada jumlah masyarakat yang telah membuat e-KTP di Kantor Camat Padang Selatan belum mencapai 55% dari keseluruhan wajib KTP yang diundang pihak kecamatan. Hal ini tentu berkaitan dengan fungsi koordinasi, sosialisasi, dan pemberian informasi pihak kecamatan dengan kelurahan beserta kepada masyarakat Padang Selatan.

Permasalahan tersebut mungkin disebabkan karena adanya struktur dan fungsi di dalam Pemerintah Kecamatan Padang Selatan yang belum menjalankan tugas mereka secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain karena permasalahan pada sumber daya manusia itu sendiri atau kurangnya pengetahuan struktur dalam menjalankan tugas mereka. Padahal struktur dan

fungsi itulah yang sangat menentukan kinerja institusi yang bersangkutan. Sehingga akan berpengaruh pada kinerja Pemerintah Kecamatan Padang Selatan secara keseluruhan. Maka berdasarkan hal di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai kinerja Pemerintah Kecamatan Padang Selatan dalam Pelaksanaan Program e-KTP di Kecamatan Padang Selatan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidak suksesnya suatu organisasi, program, atau kegiatan. Dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan elemen pokok manajemen berbasis kinerja. Perhatian terhadap pengukuran kinerja organisasi sektor publik menjadi sangat penting karena pengukuran kinerja memiliki kaitan yang erat dengan akuntabilitas publik.<sup>7</sup>

Hersey, Blanchard dan Johnson mengemukakan bahwa kinerja organisasi dipengaruhi oleh Integrasi dari pengetahuan, sumber daya bukan manusia, posisi strategis, proses kemanusiaan, dan struktur. Integrasi dari kelima faktor tersebut akan menentukan kinerja dari pemerintah Kecamatan Padang Selatan dalam Pelaksanaan Program e-KTP di Kecamatan Padang Selatan.

Namun berdasarkan fenomena yang ditemukan, faktor-faktor yang dikemukakan oleh Hersey, Blanchard, dan Johnson tadi mengalami beberapa permasalahan diantaranya rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pengurusan e-KTP, hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang bingung dalam pengurusan e-KTP di Kantor Camat Padang Selatan pada saat observasi awal dilakukan. Permasalahan lain terjadi pada struktur Pemerintah Kecamatan Padang Selatan itu sendiri, hal ini terlihat dari pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi kepada masyarakat dan kelurahan yang kurang maksimal sehingga menyebabkan

---

<sup>7</sup> Mahmudi.2005." *Manajemen Kinerja Sektor Publik*". Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Hal.6.

masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pengurusan e-KTP. Permasalahan ini tentu juga terkait dengan sumber daya manusia yang ada pada struktur dan fungsi di Kecamatan Padang Selatan, terutama yang bertugas untuk melaksanakan fungsi sosialisasi dan koordinasi tadi. Hal ini juga menimbulkan asumsi bahwa pengetahuan petugas terutama pengetahuan mengenai pelaksanaan teknis dalam melaksanakan program ini masih bermasalah. Permasalahan ini tentu tidak diharapkan terjadi pada kecamatan yang telah melakukan proyek percontohan seperti di Kecamatan Padang Selatan.

Pelaksanaan e-KTP merupakan salah satu program yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kecamatan Padang Selatan. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menitik beratkan masalah kepada *Bagaimana Kinerja Pemerintah Kecamatan Padang Selatan dalam Pelaksanaan program e-KTP di Kecamatan Padang Selatan?*

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kinerja Pemerintah Kecamatan Padang Selatan dalam pelaksanaan program e-KTP di Kecamatan Padang Selatan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan Administrasi Negara, karena di dalam penelitian ini terdapat kajian-kajian Administrasi Negara, yaitu tentang kinerja organisasi publik yang menjelaskan tentang pengukuran kinerja instansi pemerintahan. Selain itu penelitian ini juga dapat menambah referensi dan pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi Pemerintah Kecamatan Padang Selatan dan pihak terkait lainnya dalam menilai kinerja program yang telah dilaksanakan dan untuk bahan pertimbangan dalam pembuatan program kerja di masa selanjutnya.

#### 1.4.3. Manfaat Sosial

Secara sosial penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dalam menilai kinerja organisasi publik yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat itu sendiri.

### **1.5. Sistematika Pembahasan**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat serta sistematika pembahasan penelitian.

#### **BAB II : KERANGKA TEORI**

Bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu yang relevan, teori dan konsep yang digunakan, skema pemikiran penelitian.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan metode yang dipakai dalam penelitian yang terdiri dari pendekatan dan desain penelitian, teknik pengumpulan data, triangulasi data, teknik pemilihan informan, peranan peneliti, unit analisis, dan tempat penelitian, serta analisis data.

#### **BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**



Bab ini menggambarkan lokasi penelitian yang digunakan untuk mendukung penjelasan terhadap masalah yang diteliti. Adapun lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kecamatan Padang Selatan.

#### **BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pemaparan dari hasil penelitian yang ditemukan di lapangan yaitu kinerja Pemerintah Kecamatan Padang Selatan dalam pelaksanaan program e-KTP di Kecamatan Padang Selatan.

#### **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan terhadap pemaparan hasil penelitian yang disertai dengan saran peneliti terhadap masalah tersebut.